

**JIKA MESIN DI UNI EROPA HIDUP,
MAKA ORANG ASLI PAPUA YANG AKAN MATI...!!
Kebutuhan Biofuel Uni Eropa Menghancurkan Hidup Kami Di Tanah
Papua**



Pada bulan November 2016, komisi Uni Eropa (UE) telah menerbitkan sebuah proposal tentang kebijakan biofuel untuk jangka waktu tahun 2021 sampai tahun 2030 dan selanjutnya. Bahkan dalam waktu beberapa bulan yang akan datang atau tepatnya pada tahun 2017, Parlemen UE, Council UE dan ke-28 negara anggotanya akan membahas dan memutuskan kebijakan biofuel.

Dalam proposal Komisi UE, target adalah mengurangi kuota biofuel berbasis pangan (minyak nabati) dari 7% tahun 2020 sampai ke 3,8% tahun 2030. Karena kuota biofuel yang aktual dan realistis di pasar masa kini adalah 4,9%, reduksi yang diusulkan oleh UE sangat minimal. Namun hal ini tentu tetap saja berdampak buruk pada masyarakat adat di Asia Tenggara, termasuk Orang Asli Papua di provinsi Papua dan Papua Barat (Indonesia), bahwa mereka akan kehilangan hak milik atas tanah dan hutan warisan leluhurnya.

Kami tetap berpendapat bahwa kebijakan biofuel Uni Eropa akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, iklim dan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan. Kebijakan tersebut tergantung dari impor bahan dasar, terutama minyak sawit. Jutaan hektar perkebunan industrial dibutuhkan untuk produksi biofuel saja. Sejak 10 tahun terakhir, Orang Asli Papua di Indonesia masih terus kehilangan tanah dan hutan yang dikapling oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit atas izin dari pemerintah Indonesia. Kebutuhan minyak sawit telah berdampak pada ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di Tanah Papua dan telah menyebabkan Orang Asli Papua hidup dalam ketidakpastian hak atas tanah dan hutan warisan leluhurnya. Banyak masalah yang dialami oleh masyarakat sebagai dampak dari kehadiran perusahaan kelapa sawit sudah terjadi. (lihat ATLAS SAWIT Papua-2015)

Dampak buruk dari bisnis minyak sawit ini terhadap Orang Asli Papua pun beragam, mulai dari perampasan lahan, perusakan hutan dan lingkungan, pelanggaran HAM, perubahan sumber pendapatan ekonomi masyarakat adat dari peramu hasil hutan alam menjadi

buruh sawit, hingga merubah pola hidup dan akses pangan dari produktif menjadi konsumtif. Singkatnya, ekspansi perkebunan sawit sebagai konsekuensi dari tingginya

permintaan pasar minyak sawit di UE telah merampas ruang hidup dan merubah pola hidup masyarakat adat – memiskinkan orang asli di Tanah Papua.

Kami yakin bahwa jumlah minyak sawit yang dibutuhkan untuk produksi biofuel di UE sangat besar. Misalnya, dalam tahun 2015, sebanyak 3,35 juta ton minyak sawit, dibutuhkan sebagai bahan baku pilihan yang paling murah. Murahanya minyak sawit justru akan terus meningkatkan jumlah kebutuhan minyak sawit pada tahun-tahun yang akan datang. Itu berarti, kebutuhan luasan tanah dan hutan yang akan digusur untuk ditanami kelapa sawit juga semakin tinggi. Bahkan koperasi multinasional minyak tanah seperti Eni Oil (Italy), Total

Oil (France) dan Neste Oil (Finland) telah atau akan membangun rafineri raksasa untuk biofuel jenis baru yang namanya Hydrotreated Vegetable Oils (HVO). Bahan dasarnya HVO adalah minyak sawit. Adakah lahan yang cukup tersedia di wilayah negara- negara anggota UE untuk kebutuhan minyak sawit? Atau justru UE membuat kebijakan kebutuhan biofuel untuk menghancurkan kehidupan masyarakat adat di Indonesia, terutama Orang Asli di Tanah Papua? Dalam hal ini, kami berpendapat bahwa kebijakan

biofuel UE sangat tidak manusiawi dan tidak adil untuk lingkungan hidup, iklim dan masyarakat adat di Indonesia, terutama Orang Asli Papua.

Oleh karena itu, kami organisasi masyarakat sipil bersama komunitas masyarakat adat di Tanah Papua mendesak Uni Eropa untuk menghapuskan kebijakan biofuel saat ini. Uni Eropa harus meninggalkan kewajiban campuran biofuel dengan diesel/solar, dan membatalkan dukungan pedanaan sebanyak miliaran Euro per tahun untuk produksi biofuel melalui subsidi publik, rilis pajak dll. Karena kebijakan UE hanya untuk menghidupkan mesin-mesin, dan tidak peduli dengan masyarakat adat yang kehilangan tanah dan hutannya. Jika biofuel dibutuhkan untuk menghidupkan mesin-mesin di UE, maka masyarakat adat di Tanah Papua yang akan mati karena tidak ada tanah dan hutan lagi untuk bertahan hidup.

Manokwari, Papua Barat, Indonesia 28 Desember 2016



Pietsau Amafnini,

Koordinator JASOIL Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat Mobile: +6281344435008

Email: menawi2001@yahoo.com; <http://sancapapuaana.wordpress.com>;

<http://jasoilpapua.blogspot.com>

Y.L Franky Samparante,

Direktur Yayasan PUSAKA di Jakarta, Indonesia

Septer Manufandu,

Direktur JERAT Papua di Jayapura, Papua

Macx Binur,

Direktur Belantara Papua di Sorong, Papua Barat

Pastor Felix Amias MSC,

Direktur SKP-Keuskupan Agung Merauke, Papua

Daniel Yarawobi,

Kepala Suku Besar Yerisiam Gua di Nabire, Papua

Charles Tawaru,

Koordinator Greenpeace Wilayah Papua di Sorong, Papua Barat

DAMIT AUTOS IN DER EU FAHREN, MÜSSEN PAPUAS STERBEN...!!

Der Biodiesel-Bedarf der EU zerstört unser Leben im Land der Papua.



Im November 2016 veröffentlichte die EU einen Entwurf für ihre Biosprit-Politik für den Zeitraum von 2021 bis 2030. In den kommenden Monaten des Jahres 2017 werden das EU-Parlament, der EU-Rat und die 28 Mitgliedstaaten über die Biosprit-Politik diskutieren und ihre Entscheidungen treffen.

In dem Proposal sieht die EU-Kommission vor, die Quote von Biosprit aus pflanzlichen Ölen von 7% im Jahre 2020 auf 3,8% im Jahre 2030 zu reduzieren. Da die aktuelle, realistische Quote auf dem Markt 4,9% beträgt, ist die Reduktion äußerst gering. Das hat negative Folgen für die indigene Bevölkerung Südostasiens, einschließlich für die indigenen Papua in den beiden indonesischen Provinzen Papua und Westpapua, da sie damit die Rechte auf das von den Vorfahren geerbte Land und den Wald verlieren.

Wir sind der Auffassung, dass die Biosprit-Politik der EU negative Auswirkungen auf die Umwelt, das Klima und die indigenen Rechte auf Land und Wald hat. Für diese Politik ist der Import von Rohstoffen, vor allem von Palmöl, erforderlich. Millionen von Hektar Industrieplantagen sind allein für die Produktion von Biosprit notwendig. In den letzten 10 Jahren haben die indigenen Papua Indonesiens Land und Wald an Palmölplantagen-Unternehmen verloren, denen die indonesischen Regierung Genehmigungen erteilt hat. Der Bedarf an Palmöl führt zu großräumiger Expansion von Plantagen in Papua, mit der Folge, dass die indigenen Papua in Unsicherheit leben, was ihre Landrechte und die ererbten Waldrechte angeht. Unzählige Probleme sind die Folge der Ausbreitung der Ölpalmonternehmen in Papua.

Die negativen Folgen sind vielfältig: Landraub, Zerstörung der Wälder und der Umwelt, Menschenrechtsverletzungen, ein Ende der auf Jagen und Sammeln beruhenden Wildbeuter-Wirtschaft; stattdessen werden die Menschen zu Tagelöhnern auf den Plantagen. Die führt zu Veränderungen der indigenen Lebensweise mit Zugang zu Nahrungsmitteln: von einer produktiven Kultur zu einer konsumptiven. In kurzen Worten: die Expansion der Palmölplantagen, als Konsequenz des hohen Bedarfes am Markt, zerstört den Lebensraum der Indigenen und stürzt sie in Armut.

Wir wissen, dass der Bedarf an Palmöl für die Produktion von Biosprit in der EU sehr groß ist. Beispielsweise waren es 2015 3,36 Mio. Tonnen des billigen Pflanzenöls. Der Bedarf an Palmöl wird in den kommenden Jahren wegen seines günstigen Preises weiter steigen. Das heißt aber auch, dass der Bedarf an Land und Wald für Ölpalmen weiter ansteigt. Außerdem bauen internationale Konzerne wie Eni Oil (Italien), Total Oil (Frankreich) und Neste Oil (Finnland) riesige Anlagen für eine neue Art Biosprit, Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) genannt. Der Grundstoff für HVO ist Palmöl. Gibt es ausreichend Land in den Mitgliedstaaten der EU, um den Bedarf an Palmöl zu decken? Oder führt im Gegenteil die Politik der EU dazu, das Leben der Indigenen Indonesiens zu zerstören, insbesondere der Indigenen Papuas? Wir sind daher der Auffassung, dass die Politik der EU sehr unmenschlich und nicht gerecht ist:

gegenüber der Umwelt, dem Klima und den Indigenen Indonesiens, insbesondere den Papuas.

Deswegen fordern wir, zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam mit Gemeinschaften der Indigenen Papua, von der Europäischen Union, die derzeitige Biosprit-Politik aufzugeben. Die Europäische Union soll die Beimischungspflicht von Biosprit zu Diesel aufgeben und die finanzielle Unterstützung der Biosprit-Produktion in Höhe von Milliarden Euro pro Jahr in Form von Subventionen, Steuererleichterungen etc. aufgeben. Denn die EU-Politik belebt nur Maschinen, kümmert sich aber nicht um die Indigenen, die ihr Land und ihren Wald verlieren. Während Biosprit einerseits Autos in der EU versorgt, so werden andererseits die Indigenen im Land der Papua sterben - denn es gibt kein Boden und Wald mehr zum Leben.

Manokwari, Papua Barat, Indonesia 28 Desember 2016

Pietsau Amafnini,

Koordinator JASOIL Tanah Papua di Manokwari, Papua Barat Mobile: +6281344435008

Email: menawi2001@yahoo.com; <http://sancapapua.wordpress.com>;

<http://jasoilpapua.blogspot.com>

Y.L Franky Samparante,

Direktur Yayasan PUSAKA di Jakarta, Indonesia

Septer Manufandu,

Direktur JERAT Papua di Jayapura, Papua

Macx Binur,

Direktur Belantara Papua di Sorong, Papua Barat

Pastor Felix Amias MSC,

Direktur SKP-Keuskupan Agung Merauke, Papua

Daniel Yarawobi,

Kepala Suku Besar Yerisiam Gua di Nabire, Papua

Charles Tawaru,

Koordinator Greenpeace Wilayah Papua di Sorong, Papua Barat